

## WABUP BARSEL: BANTUAN PANGAN BAGIAN INTERVENSI PEMERINTAH TURUNKAN ANGKA STUNTING



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Buntok (ANTARA) - Wakil Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah Khristianto Yudha mengatakan, bantuan pangan bagi anak yang terindikasi stunting merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menurunkan angka stunting.

Hal itu dikatakannya saat membuka kegiatan pasar murah dan pemberian bantuan pangan kepada anak yang terindikasi stunting di Buntok, Rabu.

"Keberhasilan penurunan angka stunting ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat," katanya.

Untuk itu, Khristianto mengajak semua untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama guna menurunkan angka stunting maupun dalam menyukseskan program lainnya.

Menurut dia, semua ini dilakukan agar program peningkatan kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah ini.

Dia juga berharap bantuan yang diberikan ini berguna untuk anak-anak yang terindikasi stunting dan diharap kegiatan seperti ini berlanjut ke desa-desa maupun kelurahan lain di Barito Selatan. Selain itu, pihaknya juga melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok," ujarnya.

Melalui GPM ini, ia berharap dapat membantu masyarakat untuk mendapat bahan pangan berkualitas dengan harga di bawah harga pasar.

"Kegiatan ini merupakan program pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi," ucapnya.

Saya berharap dengan adanya gerakan pangan murah ini, masyarakat dapat memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya serta tetap menjaga ketertiban selama berbelanja.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Barito Selatan Ida Safitri mengatakan, seluruh komoditas pangan yang dijual dalam GPM, telah disubsidi agar bisa dijangkau masyarakat.

GPM merupakan hasil kerja sama lintas sektor dan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, dan ini merupakan implementasi program 100 hari bupati dan wakil bupati dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun harga komoditas yang tersedia, katanya, telah disesuaikan di bawah harga pasar, seperti beras SPHP yang di pasaran dengan harga Rp65 ribu, dijual dalam kegiatan ini Rp47 ribu.

Untuk komoditas lainnya yang dijual dalam kegiatan ini yakni gula pasir sebanyak 980 kg, minyak goreng 980 liter, beras SPHP 380 kemasan (kemasan 5 kg), bawang merah 300 kg, bawang putih 285 kg serta telur ayam ras sebanyak 20.000 butir.

"Kami memastikan semua komoditas tersedia dalam jumlah cukup dan berkualitas, dan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di Barito Selatan," demikian Ida Safitri.

#### **Sumber Berita:**

<https://kalteng.antaranews.com/berita/762913/wabup-barsel-bantuan-pangan-bagian-intervensi-pemerintah-turunkan-angka-stunting> Kamis, 29 Mei 2025.

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/47329/gpm-strategi-pemkab-barsel-cegah-stunting-dan-stabilitas-harga-pangan> Rabu 28 Mei 2025.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Presiden tersebut menjelaskan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraannya mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.